

PPDM: PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI DESA DI KAWASAN HUTAN MANGROVE

**Muhammad Buhari Sibuea
Yudha Andriansyah Putra**

**Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : mhd.buhari@umsu.ac.id**

Abstract

The mangrove forest area in Sei Nagalawan Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency has great potential to be developed. In addition to the large potential of natural resources, it is also due to the existence of human resources that are housed in village economic institutions in this area. The institutions referred to are the Muara Baimbai Multipurpose Cooperative and Karang Taruna Sejati, although with minimal management, they still have active activities even though they are limited. There are several causes, among others, due to the lack of the ability of human resources who are experts in the field of institutions, limited training and dissemination of innovative and creative business skills in accordance with the latest developments in information technology and the very limited ability to predict business feasibility. The solutions offered include increasing the ability of the managers of economic institutions through socialization, mentoring and training to qualify as a good and viable economic institution. Then by increasing the ability of business people in analyzing the feasibility of a business by means of continuous and regular training and mentoring. The fundamental contribution to the target audience is mainly to increase the ability of the managers of village economic institutions to manage the institution by applying ideal modern management principles so that they are able to make an effective contribution to the business development of each member in the institution so that all potential human and natural resources are expected can be managed to give the best profit.

Keyword: *empowerment, village economic institutions, mangrove forests*

Abstrak

Kawasan hutan mangrove di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Di samping potensi sumber daya alam yang besar juga karena masih eksistensinya sumber daya manusia yang bernaung di dalam lembaga ekonomi desa yang terdapat di kawasan ini. Lembaga dimaksud adalah Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai dan Karang Taruna Sejati, meskipun dengan pengelolaan yang minim akan tetapi masih mempunyai kegiatan aktif meskipun terbatas. Terdapat beberapa hal penyebab antara lain karena masih minimnya kemampuan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kelembagaan, terbatasnya pelatihan dan sosialisasi keterampilan bisnis yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan informasi teknologi terkini dan kemampuan memprediksi kelayakan usaha yang sangat terbatas. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelola lembaga ekonomi dengan melalui sosialisasi, pendampingan dan pelatihan untuk mendapatkan persyaratan sebagai lembaga ekonomi yang baik dan layak. Kemudian dengan meningkatkan kemampuan pelaku bisnis dalam menganalisis kelayakan usaha dengan cara pelatihan dan pendampingan secara kontinu dan teratur. Kontribusi mendasar pada pada khalayak sasaran terutama adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelola lembaga ekonomi desa dalam mengelola lembaga dengan menerapkan prinsip manajemen modern yang ideal sehingga mampu memberikan kontribusi efektif bagi pengembangan bisnis masing-masing anggota yang ada di lembaga sehingga diharapkan semua potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dapat dikelola untuk memberikan keuntungan terbaik.

Kata kunci: *pemberdayaan, lembaga ekonomi desa, hutan mangrove*

1. PENDAHULUAN**A. Analisis Situasi**

Menurut Mosher (1966) dalam rangka membangun struktur pedesaan yang maju dan progresif maka ada tiga lembaga yang harus ada di desa yang tidak boleh ditawarkan yaitu (1) adanya lembaga pemasaran bagi sarana produksi; (2) adanya lembaga penyuluhan atau pendidikan dan (3) adanya lembaga keuangan atau pendanaan. Seyogyanya kehadiran sebuah institusi atau lembaga dapat menampung keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan rakyat petani dan memberikan solusi terbaik. Dengan sebuah institusi yang kuat pada hakikatnya dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan petani dan memaksimalkan kekuatan-kekuatan petani yang bermuara kepada meningkatnya pendapatan petani secara ekonomis dan sikap mental secara sosiologis.

Kelemahan dasar yang mewarnai pemikiran ekonomi klasik antara lain adanya anggapan bahwa faktor lingkungan termasuk struktur kelembagaan, merupakan faktor eksternal yang diduga tetap, sehingga koperasi hanya digambarkan oleh perilaku teknologi. Teori perusahaan seperti ini sama dengan teori produksi yang menyebabkan orang melihat koperasi sebagai suatu agregat (Pakpahan, 1990). Secara tidak sadar, pemikiran tersebut mewarnai inspirasi negara-negara berkembang dalam menyusun perencanaan ekonominya, padahal lingkungan dan institusi merupakan faktor yang ikut menentukan keberhasilan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (1984) pembangunan ekonomi desa mengandung unsur-unsur (1) inovasi teknologi dan sosial, (2) informasi, (3) insentif, (4) infrastruktur, (5) investasi dan (6) institusi atau kelembagaan. Aspek pertama sampai aspek kelima bersifat saling mengisi antara yang satu dengan yang lain, sedangkan yang keenam bersifat merekayasa kelima unsur-unsur di atas.

Demikian juga dengan situasi yang terjadi di kawasan wisata mangrove yang berada di Desa Sei Nagalawan dimana pada 1990-an kawasan pesisir di desa ini mengalami aberasi pantai yang luar biasa. Akibatnya bibir pantai tergerus oleh air laut dan terjadi interusi air laut ke lahan pertanian penduduk. Kerusakan ini akibat dari alih fungsi hutan mangrove pada tahun 1980-an menjadi tambak udang yang terjadi hampir di seluruh kawasan pesisir timur Sumatera Utara. Kawasan pantai Desa Sei Nagalawan mengalami kerusakan parah dimana hampir sejauh 500 meter bibir pantai yang tergerus oleh air laut dan

garis pantai hampir mencapai ke pemukiman penduduk. Situasi ini tidak hanya berakibat pada rusaknya kawasan pesisir akan tetapi berakibat pula dengan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional sebab hutan mangrove yang menjadi tempat tinggal biota laut semakin rusak.

Pada tahun 1992 Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan desa masuk ke kawasan ini khususnya kepada masyarakat nelayan, yakni lembaga WPAP (Wadah Pengembangan Alternatif Pedesaan) di Desa Sei Nagalawan khususnya di Dusun III Sungai Nipah. Lembaga ini mengembangkan berbagai kegiatan dengan membentuk kelompok perempuan nelayan dan kelompok nelayan dengan program kerja konservasi kawasan pesisir dengan melakukan penanaman pohon bakau dan meningkatkan ekonomi perempuan pesisir melalui UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam).

Kehadiran LSM ini dinilai sangat banyak membawa perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai lingkungan/kawasan pesisir dan ketika LSM ini tidak lagi bekerja di Sei Nagalawan sudah banyak meninggalkan kader-kader masyarakat yang peduli dan mencintai lingkungannya. Berbagai kegiatan yang pernah dilakukan LSM ini bersama masyarakat adalah pembuatan mina bakau dengan memelihara ikan dan menanam pohon bakau pada tahun 1994 di kawasan yang termasuk di dalam kawasan konservasi hutan mangrove. Dari sekitar 10.000 batang bibit bakau yang ditanam hanya sekitar 0.5 persen saja yang mampu bertahan disebabkan proses aberasi lebih cepat terjadi dan pada perkembangan tanaman bakau yang ditambah kelompok, sebahagian lagi punah karena tidak terawat dan ditebang oleh masyarakat sekitar yang tidak mengerti akan manfaatnya.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok nelayan yang selama ini telah berjuang untuk melestarikan kawasan hutan mangrove khususnya di Desa Sei Nagalawan untuk terus melakukan aktifitas pelestarian hutan mangrove. Berangkat dari kesadaran kritis masyarakat yang berhimpun dalam Kelompok Nelayan Kayuh Baimbai dan Kelompok Perempuan Muara Tanjung pada tahun 2009 membentuk sebuah kelompok tani hutan mangrove yang diberi nama Kelompok Konservasi Mangrove Baimbai.

KSU Muara Baimbai merupakan penggabungan dua kelompok sebelumnya, yaitu Kelompok Nelayan Kayuh Bimbai dan Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung. Koperasi ini berdiri pada tahun 2012 dengan memulai usaha ekowisata mangrove kemudian

seiring berjalannya waktu merambah pada usaha simpan pinjam, olah pangan, hasil tangkap nelayan, dan budidaya pertambakan.

B. Permasalahan yang Dihadapi Desa Mitra

Berdasarkan analisis situasi maka terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam setiap kegiatan ekonomi pada lembaga ekonomi desa di kawasan hutan mangrove yaitu :

- a. Masih sangat minimnya kemampuan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kelembagaan keorganisasian koperasi atau karang taruna yang bergerak di bidang bisnis atau ekonomi pedesaan.
- b. Sangat terbatasnya pelatihan dan sosialisasi ketrampilan bisnis di desa yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi terkini.
- c. Kemampuan untuk memprediksi kelayakan usaha yang sangat terbatas dan bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang kelayakan suatu usaha.

2. METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Rencana kegiatan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) di Kawasan Hutan Mangrove Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan dengan metode penyuluhan, pendampingan dan pelatihan yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan.

B. Metode Pendekatan Pelaksanaan PPDM

Dalam Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Mitra ini digunakan model atau instrumen pendekatan berbagai bidang keahlian dengan melibatkan 3 (tiga) macam kepakaran yang khas dan spesifik yaitu manajemen kelembagaan (keorganisasian), sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan perencana pengembangan wilayah.

Pola penyelesaian masalah mitra di Desa Sei Nagalawan melalui berbagai tahapan :

1. Pertemuan dan koordinasi sekaligus sosialisasi dengan mitra binaan; dimana pada tahap ini tim pengusul menggandeng Pemerintahan Kecamatan Perbaungan dan Pemerintahan Desa Sei Nagalawan melakukan pertemuan dengan mitra untuk penguatan komitmen atas pembagian tugas yang disepakati.
2. Penentuan unit usaha ekonomi (dalam hal ini adalah usaha yang dikelola oleh lembaga ekonomi koperasi dan karang taruna) dimana pada tahap ini Kepala Dusun I dan Kepala Dusun III dilibatkan dalam upaya menentukan unit usaha yang tepat sasaran.

3. Kunjungan langsung ke unit usaha yang terpilih (yang dikelola oleh koperasi dan karang taruna); melakukan kegiatan advokasi atau pemerhatian mendalam untuk mendapatkan informasi akurat tentang usaha dimaksud. Tim pengusul membawa cenderamata kepada para pengelola kegiatan usaha untuk lebih meningkatkan kebersamaan dengan para pelaku bisnis. Tim pengusul mentabulasi secara cermat temuan-temuan yang diperoleh saat kunjungan dan advokasi.
4. Melaksanakan kegiatan workshop dengan seluruh elemen mitra binaan yaitu para pelaku bisnis yang berasal dari lembaga koperasi dan lembaga karang taruna. Para pelaku bisnis yang terpilih yang berada di bawah kedua lembaga ekonomi tersebut diikutsertakan sebagai peserta workshop dan pelatihan. Workshop akan dipandu oleh ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul serta fasilitator teknis lapangan akan dibantu oleh tenaga lapangan yang berasal dari unsur mahasiswa bimbingan. Materi workshop akan dikemas sedemikian rupa dengan memberikan muatan materi pelatihan yang bernuansa manajemen keorganisasian, perencanaan pengembangan wilayah desa dan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis).
5. Pre dan post tes sekaligus latihan dan uji coba akan dilaksanakan secara terpisah dengan menggunakan kuesioner dan dengan pemerhatian secara cermat. Tujuannya adalah dalam rangka memastikan apakah materi workshop dan pelatihan yang telah dilaksanakan telah dapat dipahami oleh para pelaku bisnis. Pre dan post tes ini akan diuji coba langsung dengan bisnis daripada masing-masing anggota lembaga ekonomi sehingga prinsipnya adalah dengan prinsipnya *learning by doing*.
6. Monitoring dan evaluasi; dimana pada tahap ini tim pengusul bersama dengan mitra binaan akan melakukan pertemuan secara rutin secara periodik dan juga melakukan kunjungan ke sentra-sentra produksi dan usaha dalam upaya memastikan pelaksanaan atau implementasi program benar-benar telah diterapkan secara baik dan benar.
7. Publikasi dan rencana tindak lanjut; dimana pada tahap ini pengusul merancang suatu panduan atau modul pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi desa (dalam hal ini berbasis koperasi) yang akan dipublikasikan melalui media cetak. Hasil kuesioner yang didapatkan akan dipublikasikan melalui jurnal internasional dan atau nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengembangan Desa Mitra ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan meliputi :

A. **Persiapan;** Rapat koordinasi tim dimana dalam forum ini dilaksanakan pembagian tugas sedemikian rupa sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dan juga dibahas tentang teknik pelaksanaan sesuai dengan target penyelesaian program pengabdian; Pengurusan perizinan, yang mencakup izin melakukan pengabdian pada masyarakat setempat kepada Kepala Desa Sei Nagalawan; Rapat koordinasi dengan mitra berkaitan dengan kesiapan lokasi program pengabdian dan identifikasi lembaga ekonomi desa yang akan didampingi.

B. **Monitoring**

Pada tahapan monitoring ini maka dilakukan berbagai aktifitas kegiatan yang meliputi : (a) Identifikasi lembaga ekonomi desa yang ada dan terkait dengan aktifitas ekonomi pertanian di kawasan Hutan Mangrove; (b) Lembaga ekonomi dimaksud dimonitor sedemikian rupa sehingga diketahui secara persis bagaimana mekanisme atau proses kegiatan ekonomi itu berlangsung, sehingga pada gilirannya dapat diketahui problema-problema yang terjadi di lapangan; (c) Juga dimonitor secara akurat karakteristik masyarakat pelaku ekonomi untuk nantinya dapat disesuaikan sedemikian rupa dengan model implementasi pemberdayaan kelembagaan yang akan disosialisasikan nantinya; (d) Monitoring model kelembagaan yang selama ini telah berjalan di kawasan hutan mangrove dengan segala kekurangan dan kelebihan sehingga dapat ditemukan model yang paling cocok diterapkan di kawasan ini.

C. **Workshop dan Pendampingan**

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi : (a) Workshop atau penyuluhan tentang menjalankan lembaga ekonomi desa yang ideal dan proporsional yang sesuai karakteristik masyarakat desa. Dalam hal ini ada beberapa lembaga ekonomi yang ditemukan dan dianggap sangat potensial untuk dikembangkan dengan menerapkan prinsip manajemen organisasi yang baik dan kontemporer; (b) Terdapat dua kelembagaan yang potensial untuk dikembangkan sehingga sangat perlu untuk didampingi dan dibina. Kedua lembaga itu adalah Koperasi Serba

Usaha Muara Baimbai dan Karang Taruna Sejati dan kedua-duanya beraktifitas di lokasi yang sama di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; (c) Lembaga KSU Muara Baimbai lebih fokus kepada kegiatan yang berada hanya di kawasan hutan mangrove; (d) Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai Terletak di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 3 (tiga) Dusun dengan luas wilayah \pm 875 Ha, dengan batas – batas di Utara berbatasan dengan Selat Malaka, di Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Mengkudu, di Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Bayas dan di Barat berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin; (e) Eksistensi Lembaga Ekonomi desa yang bernama KSU Muara Baimbai ini termasuk unik karena memiliki berbagai unit usaha ekonomi yang potensial. Pada saat ini jumlah seluruh anggota koperasi dan pengurus serta pengawas berjumlah 68 orang yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 32 orang perempuan;

D. **Operasional Kegiatan Lembaga Ekonomi**

Terdapat 5 bidang usaha dari KSU ini yaitu :

(1) **Bidang Usaha Ekowisata Mangrove** dimana pada bidang usaha ekowisata mangrove kegiatan yang dilakukan meliputi, kegiatan pemasaran hasil olah pangan tanaman mangrove, menyediakan sarana pembelajaran bagi para pengunjung dengan berbagai paket pembelajaran seperti pembelajaran mengenai tanaman mangrove, pembelajaran pengolahan tanaman mangrove menjadi makanan serta pembelajaran mengenai Koperasi. Selain itu ekowisata mangrove juga menyediakan hiburan musik bagi pengunjung setiap hari libur serta makanan yang bisa dipesan sesuai keinginan seperti makanan siap jadi yang diolah dari bahan baku laut (kepiting, udang, ikan). Selain itu ekowisata mangrove mengenakan tarif tiket masuk sebesar Rp.10.000 dimana biaya tersebut sudah termasuk pada biaya retribusi yang diatur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp.3.000 yang ditanggung pihak ekowisata mangrove serta biaya parkir untuk kendaraan bermotor beroda dua dan tiga dikenakan tarif sebesar Rp.10.000/motor dan untuk mobil dikenakan tarif Rp.15.000/mobil.

(2) **Bidang Usaha Simpan Pinjam**

Kegiatan yang dilakukan meliputi, akses peminjaman uang dan penyimpanan uang dimana anggota koperasi hanya boleh meminjam

uang sebesar Rp.2.000.000 maksimal dan para anggota dikenakan iuran wajib sebesar Rp.10.000/bulan.

(3) Bidang Usaha Olah Pangan

Kegiatan yang dilakukan meliputi, eksploitasi sumberdaya lokal yaitu tanaman mangrove yang di olah menjadi produk makanan seperti pembuatan dari daun jeruju (mangrove), pembuatan kerupuk dan pembuatan sirup dari tanaman mangrove dan melakukan eksperimen pembuatan bahan makanan dari tanaman mangrove.

(4) Bidang Usaha Hasil Tangkap Nelayan

Kegiatan yang dilakukan meliputi pemasaran hasil tangkap laut yang dilakukan oleh nelayan dimana usaha ini menjadi penjamin harga dan media informasi bagi para nelayan untuk penetapan harga dan keuntungan. Hasil dari para nelayan nantinya akan dipasarkan oleh unit usaha ini dengan harga yang telah ditetapkan tadi. Keuntungan akan menjadi penghasilan koperasi dan menjadi tabungan bagi para nelayan.

(5) Bidang Usaha Budidaya Pertambakan

Kegiatan yang dilakukan adalah budidaya udang vanamei dengan memanfaatkan 11 unit kolam yang dimiliki koperasi. Hasil budidaya tersebut dijual dengan harga berdasarkan kelasnya yaitu udang vanamei kelas A dijual dengan harga Rp. 100.00 s/d Rp. 120.000, udang vanamei kelas B dengan harga Rp. 70.000 s/d Rp. 80.000 dan untuk udang vanamei kelas C dengan harga Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000 per kilogram.

E. Evaluasi dan Sosialisasi

Setelah dilakukan pendampingan dan sosialisasi tentang pemberdayaan lembaga ekonomi desa di Desa Sei Nagalawan maka dilanjutkan dengan evaluasi program yang bertujuan untuk melihat sejauhmana hasil yg didapatkan dari program ini.

Bahwa KSU Muara Baimbai merupakan penggabungan dua kelompok sebelumnya yaitu Kelompok Nelayan Kayuh Bimbai dan Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung. Kata Muara Baimbai dipilih karena memiliki filosofi tersendiri bagi kelompok ini. Muara diambil dari kelompok perempuan yang berarti ujung atau akhir, sementara Baimbai memiliki arti bersama-sama. Kata Baimbai memiliki arti bersama-sama. Kata Baimbai diletakan pada bagian paling belakang diartikan sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki kepada perempuan untuk mendayung secara bersama-sama mencapai satu tujuan. Kayu

Baimbai sendiri merupakan jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat dayung. KSU Muara Baimbai sendiri secara badan Hukum Berdiri pada tahun 2012 dengan memulai usaha pada usaha ekowisata mangrove kemudian seiring berjalannya waktu meramba pada usaha simpan pinjam, olah pangan, hasil tangkap nelayan dan budidaya pertambakan.

Potensi ekonomi yang dimiliki KSU Muara Baimbai dapat dilihat dari bidang usaha yang dimiliki. Bidang usaha ekowisata mangrove dimana pada usaha ini koperasi melakukan pemanfaatan sumber daya lokal yaitu tanaman mangrove yang awalnya hanya di anggap sebagai tanaman pemecah ombak dan namun mereka mampu menjadikan tanaman ini memiliki nilai ekonomi dengan memanfaatkannya sebagai objek wisata pantai mangrove dengan nama ekowisata mangrove. Selain itu KSU Muara Baimbai terus melakukan penggalan potensi baik dari tanaman mangrove dan potensi laut yang ada, dimana koperasi memanfaatkan tanaman mangrove dengan melakukan eksperimen untuk mengolah tanaman mangrove menjadi bahan makanan yang aman dikonsumsi serta memiliki manfaat yang menyehatkan bagi tubuh jika dikonsumsi sehingga memiliki nilai jual tersendiri. Untuk potensi laut yang dimanfaatkan oleh koperasi antara lain dengan menjadikan hasil laut sebagai olahan makanan siap saji. Dari hasil laut atau hasil tangkap nelayan ini koperasi juga melakukan kegiatan pemasaran yang berujung mensejahterakan para nelayan yang menjadi anggota koperasi dari hasil pemasaran hasil laut yang di tangkap oleh nelayan.

F. Kekuatan Lembaga Ekonomi Di Kawasan Hutan Mangrove adalah :

(1) Lokasi Strategis; KSU Muara Baimbai berada di Desa Sei Nagalawan yang merupakan desa yang terletak di pesisir pantai dan terdapat banyak objek wisata lainnya. Selain itu juga koperasi memiliki bidang usaha objek wisata yang bernama ekowisata mangrove dengan jarak dari Kota Medan menuju lokasi kurang lebih 45 km; **(2). Edukasi pada ekowisata;** Ekowisata mangrove memberikan edukasi kepada para pengunjung mulai dari pembelajaran pentingnya melestarikan alam dengan penanaman tanaman pemecah ombak atau biasa disebut tanaman mangrove; **(3). Jenis usaha koperasi;** KSU Muara Baimbai memiliki 5 bidang usaha yaitu diawali dengan ekowisata mangrove, simpan pinjam, olah pangan, hasil tangkap nelayan,

dan budidaya pertambakan; (4). **Harga produk olahan makanan;** Harga produk olahan makanan yang ditawarkan Koperasi cukup murah dengan harga yang dibanderol Rp. 8.000 untuk keripik jeruju, Rp. 10.000 untuk teh jeruju, Rp. 15.000 dodol mangrove dan Rp.12.000 untuk sirup mangrove. Oleh karena itu dengan harga yang cukup murah tersebut para pengunjung sudah bisa menikmati olahan mangrove yang alami dan dibuat dengan bahan tambahan dengan kualitas terbaik; (5) **Satu-satunya produk olahan mangrove:** Produk olahan mangrove yang diproduksi KSU Muara Baimbai merupakan satu-satunya Kabupaten Serdang Bedagai yang menggunakan bahan baku mangrove sebagai bahan baku untuk produk olahan pangan seperti keripik, teh, dodol dan sirup.

G. Kelemahan Lembaga Ekonomi : (1). **Kurangnya pemasaran produk olahan mangrove;** KSU Muara Baimbai melakukan pemasaran produk olahan mangrove seperti teh jeruju, sirup mangrove dan kerupuk jeruju hanya dilakukan di ekowisata mangrove dengan membuka galeri, namun pemasaran yang dilakukan masih kurang baik karena belum bisa menarik minat para kosumen lebih besar; (2). **Infrastruktur pada ekowisata mangrove;** Infrastruktur yang dimiliki KSU Muara Baimbai lebih tepatnya pada bidang usaha ekowisata mangrove terdapat fasilitas jembatan yang terbuat dari bambu yang sudah rusak yang biasa digunakan untuk menikmati indahnya mangrove yang ada di sekitar pantai dan kurangnya ikon yang menarik para pengunjung seperti tempat berfoto jika dibandingkan dengan objek wisata lain. Selain itu jalan yang sempit membuat kendaraan besar sulit untuk menuju ekowisata mangrove ini; (3). **Kurangnya tenaga ahli pertambakan;** Kurangnya sumber daya manusia ahli dalam budidaya pertambakan budidaya udang vanamei membuat KSU Muara Baimbai pernah mengalami kegagalan produksi; (4). **Kurangnya peralatan budidaya pertambakan;** Peralatan yang dimiliki KSU Muara Baimbai masih sangat kurang memenuhi kebutuhan untuk dapat digunakan dalam proses budidaya udang vanamei.

H. Strategi Pengembangan

Strategi prioritas yang paling cocok untuk direkomendasikan kepada Lembaga Ekonomi Desa terutama untuk KSU Muara Baimbai berdasarkan monitoring dan hasil elaborasi dengan pelaku bisnis di desa kawasan hutan mangrove adalah :

1. Melakukan pengembangan produk dengan

memanfaatkan kualitas produk dan produk yang bervariasi.

2. Optimalisasi usaha koperasi dengan melakukan pengembangan serta penguatan usaha koperasi.
3. Menawarkan potongan harga (discount) setiap pembelian produk.
4. Mempertahankan kualitas dan ciri khas produk olahan mangrove.
5. Melakukan promosi secara kontinu dengan pembuatan brosur dan membuat banner serta pemanfaatan media sosial untuk lebih menunjukkan keberadaan ekowisata dengan menunjukkan edukasi yang ditawarkan.
6. Melakukan diversifikasi pakan budidaya pertambakan dengan pemanfaatan pakan organik.
7. Menjaga kepercayaan anggota koperasi.
8. Melakukan perbaikan infrastruktur dengan menambah fasilitas-fasilitas yang menarik pada ekowisata mangrove.
9. Melakukan promosi produk dengan kontinu lewat brosur, media cetak, elektronik dan penjualan produk secara online.
10. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dalam usaha budidaya pertambakan serta pemenuhan peralatan yang tepat guna.
11. Mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki koperasi.

4. Kesimpulan

- a. Desa Mitra Binaan memperoleh pengetahuan dan inovasi tentang pemberdayaan lembaga ekonomi desa dalam hal ini adalah organisasi koperasi dan karang taruna.
- b. Desa Mitra dan lembaga ekonomi terkait dapat mengetahui berbagai cara dan inovasi baru untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas lembaga.
- c. Para pelaku ekonomi yang beraktifitas di kawasan hutan mangrove mendapatkan pengetahuan kontemporer tentang manajemen organisasi atau kelembagaan.
- d. PPDM menambah pengetahuan pengelola desa mitra dan lembaga ekonomi terkait dalam konteks menganalisis strategi dan cara terbaik dalam mengelola organisasi ekonomi sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.

5. Saran

Diharapkan kepada pengelola desa mitra dan lembaga ekonomi, seyogyanya harus fokus untuk mengembangkan usaha pemberdayaan anggota dengan cara pendampingan dan pembinaan melalui kerjasama dengan lembaga terkait misalnya Perguruan Tinggi, Lembaga Pemasaran dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, D.C. and Jarome W. Hammond. 1977. *Market and Palace Analysis, The Agricultural Industries: Marketing and Pricing Institutions*. New York: McGraw-Hill.
- Esman, M.J. 1972. *The Element of Institution Building*. Dalam Joseph W Eaton: *Institution Building and Development*. London: SAGE Publications, Beverly Hills.
- ICA. 1995. *Strategies for Succes: Helping Your Cooperative Explore New Alliance*. International Cooperative Alliance (ICA) Communication, May 1995(//gopher.adp.wisc.edu: 70).
- Mosher, A.T. 1966. *Getting Agricultural Moving*. Frederick A. Praeger, Inc., Publishers, New York
- Pakpahan, A. 1990. *Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Makalah Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah di Medan.
- Todaro, M.D. 1984. *Economic Development in The Third World*. Second Edition. London: Longman.
- Sibuea, M.B. 2015. Analisis Peranan Koperasi Dalam Kegiatan Usaha Tani di Kabupaten Langkat. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian* Volume 8 Nomor 1 Edisi Februari 2015. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Spechler, M.C. 1990. *Perspectives in Economic Thought*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPDM:



